

MODEL HEXAHELIX: IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI

Riza Purnama¹⁾, Rakhmat Saleh²⁾, Tina Cahya Mulyatin³⁾,
Nova Chalimah Girsang⁴⁾, Tofan Ibrahim⁵⁾

^{1,3,4,5)} Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar

²⁾[Ilmu Pemerintahan – Universitas Baturaja]

[Gerilya Kota Banjar, Jawa Barat]

[Kabupaten OKU, Sumatera Selatan)

Email : rizapurnama06@gmail.com¹⁾, rakhmatsaleh24@gmail.com²⁾, cahyamulyatin@gmail.com³⁾
novahalimah38@gmail.com⁴⁾, tofaniabraham94@gmail.com⁵⁾

ABSTRACT

Empowering Women Farmers Groups (KWT) is an important strategy in strengthening food security, household economies, and inclusive rural development. However, the implementation of KWT empowerment programs often faces limitations in coordination, fragmentation of roles among actors, and weak program sustainability. This study aims to analyze the application of the Hexahelix Model as a collaborative approach in the implementation of KWT empowerment programs. The Hexahelix Model emphasizes the synergy of six key actors, namely the government, academics, business actors, communities, the media, and financial institutions, in an integrated policy ecosystem. Through a conceptual-analytical approach based on a review of the latest literature, this study shows that the Hexahelix Model is capable of strengthening the effectiveness of KWT empowerment programs through institutional capacity building, access to resources, local-based innovation, and expansion of marketing networks. Thus, the Hexahelix Model can be positioned as an adaptive and sustainable strategic framework in supporting women's empowerment in the agricultural sector.

Keywords: Hexahelix model, empowerment, Women Farmers Groups, multi actor collaboration, rural development

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan pertanian dan pedesaan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga (Setiyaningsih, 2025). Perempuan tani memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pelaku produksi pangan, tetapi juga sebagai pengelola ekonomi keluarga dan penjaga keberlanjutan sumber daya lokal (Aliffianti & Rachma, 2023; Kasim et al., n.d.). Oleh karena itu, keberadaan KWT menjadi sarana penting dalam mendorong partisipasi perempuan secara kolektif (Kurniawati, 2025; Pelawi et al., 2025; Sunu, 2024) agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosialnya secara berkelanjutan (Asnuryati, 2023; Azizah, 2024).

Dalam praktiknya, berbagai program pemberdayaan KWT telah diluncurkan oleh pemerintah melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, dan pendampingan kelembagaan. Namun, capaian program tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih berorientasi pada pencapaian output jangka pendek (Asnuryati, 2023; Azizah, 2024; Indraningsih & Mardiharini, 2021). Program sering kali berhenti pada

tahap distribusi bantuan (TARAKAN, n.d.), tanpa disertai penguatan kapasitas jangka panjang yang mampu mendorong kemandirian kelompok. Kondisi ini menyebabkan KWT rentan mengalami stagnasi setelah program berakhir.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam implementasi program pemberdayaan KWT adalah lemahnya koordinasi antaraktor yang terlibat (Artini et al., 2025; Jurnal & Anggoma, 2022; Nurhayati et al., 2025). Setiap aktor cenderung menjalankan perannya secara terpisah, sehingga menimbulkan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program. Akibatnya, potensi sinergi antaraktor tidak termanfaatkan secara maksimal, dan KWT kesulitan mengakses sumber daya yang sebenarnya tersedia di lingkungan sekitarnya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan (Kahle & Stulz, 2013) dan pasar masih menjadi hambatan struktural bagi pengembangan KWT. Banyak kelompok yang mampu menghasilkan produk pertanian atau olahan pangan, tetapi tidak memiliki dukungan pembiayaan dan jaringan pemasaran yang memadai. Tanpa keterlibatan pelaku usaha dan lembaga keuangan secara sistematis, kegiatan ekonomi KWT cenderung



bersifat subsisten dan sulit berkembang menjadi usaha yang berdaya saing (Efendy et al., 2025; Suhartini et al., 2025).

Di sisi lain, peran akademisi dalam pemberdayaan KWT masih belum terintegrasi secara optimal (HABIBUROHMAN, 2023; Sahreza, 2023). Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sering kali berjalan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Padahal, kontribusi akademisi sangat penting dalam menyediakan inovasi teknologi tepat guna, penguatan manajemen kelompok, serta pendampingan berbasis riset yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Perkembangan media digital juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana promosi (Yanuarita & Desnia, 2023), edukasi, dan advokasi bagi KWT. Minimnya literasi media (Adila et al., 2019; Arifiah et al., 2022) dan kurangnya strategi komunikasi menyebabkan produk dan aktivitas KWT kurang dikenal oleh publik. Padahal, media memiliki peran strategis dalam membangun citra positif, memperluas pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk berbasis pertanian lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pemberdayaan KWT bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Diperlukan suatu model kolaborasi yang mampu mengintegrasikan peran berbagai aktor secara sistematis dan berkelanjutan. Model Hexahelix hadir sebagai pengembangan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem kebijakan yang terkoordinasi.

Meskipun konsep kolaborasi multi-aktor (Wicaksono, 2019) telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada model Triple Helix (Leydesdorff, 2000), Quadruple Helix (Miller et al., 2018), atau Pentahelix (Halibas et al., 2017), terutama dalam konteks inovasi industri dan pariwisata. Kajian yang menempatkan Model Hexahelix (Rachim et al., 2020) sebagai kerangka implementatif dalam pemberdayaan kelompok perempuan di sektor pertanian masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi. Selain keterbatasan pada aspek model, penelitian sebelumnya juga cenderung menekankan pengukuran keberhasilan program secara kuantitatif, seperti peningkatan produksi atau pendapatan. Pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan secara mendalam proses kolaborasi, dinamika relasi kekuasaan, serta faktor sosial-institusional yang memengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan KWT. Padahal, aspek-aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait belum adanya kajian kualitatif yang komprehensif mengenai implementasi Model Hexahelix dalam program pemberdayaan

Kelompok Wanita Tani. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam peran, interaksi, dan kontribusi masing-masing aktor dalam Model Hexahelix, serta implikasinya terhadap efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan KWT. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model kolaborasi multi-aktor, sekaligus rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Ahmad et al., 2022) dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi Model Hexahelix dalam program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan proses, makna, serta dinamika interaksi antaraktor yang terlibat, sehingga memungkinkan peneliti menangkap realitas empiris secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan kelembagaan di lapangan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada wilayah yang memiliki pelaksanaan program pemberdayaan KWT dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, meliputi unsur pemerintah, akademisi atau pendamping, pelaku usaha, pengurus dan anggota KWT, media, serta lembaga keuangan. Pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program pemberdayaan KWT.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan peran masing-masing aktor dalam kerangka Model Hexahelix. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pemberdayaan dan pola kolaborasi yang terjadi, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan pengecekan ulang kepada informan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas Model Hexahelix dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.

III. PEMBAHASAN

Pembahasan ini diarahkan untuk menginterpretasikan temuan penelitian mengenai implementasi Model Hexahelix dalam program



pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) secara komprehensif dan kritis. Model Hexahelix digunakan sebagai kerangka analisis utama karena mampu menjelaskan kompleksitas kolaborasi multi-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan, sekaligus mengungkap relasi peran, kepentingan, dan kontribusi masing-masing aktor dalam satu ekosistem kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan tidak hanya berhenti pada capaian program, tetapi juga menelaah proses, dinamika, dan tantangan implementatif yang terjadi di lapangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan KWT tidak dapat dipahami sebagai intervensi teknis semata, melainkan sebagai proses sosial dan kelembagaan yang dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor. Setiap aktor dalam Model Hexahelix memiliki peran strategis yang saling terkait, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat sinergi, kejelasan peran, dan mekanisme koordinasi yang terbangun. Ketidakseimbangan kontribusi antaraktor berpotensi melemahkan keberlanjutan program, meskipun secara normatif kerangka kebijakan telah tersedia.

Oleh karena itu, pembahasan ini diorganisasikan berdasarkan dimensi-dimensi Hexahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas KWT, media, dan lembaga keuangan. Setiap dimensi dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta implikasinya terhadap efektivitas pemberdayaan KWT. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Model Hexahelix bekerja dalam praktik, sekaligus mengungkap ruang perbaikan yang diperlukan agar model ini dapat berfungsi secara optimal sebagai kerangka pemberdayaan yang berkelanjutan.

1. Dimensi Pemerintah (Government)

Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam implementasi program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan KWT telah tersedia dalam bentuk program dan dukungan anggaran, namun implementasinya masih bersifat administratif dan berorientasi pada penyerapan program tahunan. Pemerintah cenderung berfokus pada output kegiatan, seperti jumlah pelatihan dan bantuan sarana, tanpa diikuti mekanisme evaluasi keberlanjutan. Secara kritis,

kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi orkestrasi kebijakan, di mana pemerintah belum sepenuhnya mampu menyinergikan peran aktor lain dalam kerangka Hexahelix secara strategis dan berkelanjutan.

2. Dimensi Akademisi

Peran akademisi dalam pemberdayaan KWT masih dominan pada aspek transfer pengetahuan teknis dan kegiatan pendampingan jangka pendek. Keterlibatan akademisi belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus kebijakan pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Secara kritis, lemahnya integrasi riset dengan praktik lapangan menyebabkan inovasi yang dihasilkan belum sepenuhnya kontekstual dan berkelanjutan. Padahal, akademisi memiliki potensi besar dalam mengembangkan inovasi berbasis kearifan lokal, model bisnis sederhana, serta penguatan kapasitas kelembagaan KWT yang berorientasi pada kemandirian.

3. Dimensi Pelaku Usaha

Pelaku usaha berperan penting dalam membuka akses pasar dan menciptakan nilai tambah produk KWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sektor usaha masih bersifat sporadis dan berbasis kepentingan jangka pendek. Kemitraan yang terbangun belum mengarah pada hubungan yang setara dan berkelanjutan, sehingga posisi tawar KWT relatif lemah. Analisis kritis menunjukkan bahwa absennya skema kemitraan yang adil dan terstruktur menyebabkan KWT sulit naik kelas dari kelompok produksi subsisten menjadi unit usaha produktif yang berdaya saing.

4. Dimensi Komunitas

KWT sebagai aktor utama menunjukkan tingkat partisipasi dan solidaritas sosial yang relatif kuat. Namun, kapasitas kelembagaan dan manajerial kelompok masih menjadi tantangan utama. Banyak KWT masih bergantung pada arahan eksternal, baik dari pemerintah maupun pendamping, sehingga kemandirian kelompok belum sepenuhnya terbentuk. Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi proses penguatan kapasitas internal, melainkan masih berada pada tahap fasilitasi eksternal.

5. Dimensi Media

Peran media dalam pemberdayaan KWT masih belum dimanfaatkan secara optimal. Media cenderung berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan seremonial,



bukan sebagai instrumen strategis untuk promosi produk, edukasi publik, dan penguatan branding KWT. Analisis kritis menunjukkan bahwa rendahnya literasi media digital dan minimnya strategi komunikasi menyebabkan potensi media sebagai pengungkit nilai ekonomi dan sosial belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal, media memiliki posisi penting dalam memperluas jejaring pasar dan meningkatkan daya saing produk KWT.

6. Dimensi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam menyediakan akses permodalan dan literasi keuangan bagi KWT. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan masih terbatas dan cenderung prosedural, sehingga belum sepenuhnya ramah terhadap karakteristik KWT. Skema pembiayaan yang tersedia belum disertai pendampingan yang memadai, sehingga risiko ketergantungan dan kegagalan usaha masih tinggi. Secara kritis, kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi skema pembiayaan inklusif yang selaras dengan kapasitas dan kebutuhan riil KWT.

Sintesis Kritis Model Hexahelix

Secara keseluruhan, implementasi Model Hexahelix dalam pemberdayaan KWT menunjukkan potensi besar dalam menciptakan ekosistem kolaboratif yang integratif. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antaraktor masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Kelemahan utama terletak pada absennya mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta indikator kinerja kolaboratif yang terukur. Oleh karena itu, Model Hexahelix belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem kolaborasi yang adaptif dan berkelanjutan, melainkan masih sebagai kerangka normatif.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Model Hexahelix memiliki relevansi dan potensi strategis dalam implementasi program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) karena mampu mengintegrasikan peran berbagai aktor dalam satu ekosistem kolaboratif. Pemberdayaan KWT tidak hanya ditentukan oleh besarnya intervensi program, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi antaraktor yang terlibat, kejelasan pembagian peran, serta keberlanjutan mekanisme kolaborasi yang dibangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah masih dominan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mengorkestrasi kolaborasi lintas aktor secara sistematis dan berkelanjutan. Akademisi berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan inovasi, tetapi keterlibatannya belum terintegrasi secara utuh dalam siklus kebijakan. Pelaku usaha, media, dan lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pengungkit nilai tambah ekonomi, perluasan pasar, serta akses pembiayaan inklusif bagi KWT. Sementara itu, KWT sebagai aktor inti telah menunjukkan partisipasi yang cukup kuat, namun masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kemandirian usaha.

Secara keseluruhan, implementasi Model Hexahelix dalam pemberdayaan KWT masih berada pada tahap kolaborasi parsial dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Model ini cenderung berfungsi sebagai kerangka normatif, belum sepenuhnya menjadi sistem tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, integrasi peran aktor, serta inovasi kebijakan yang mendukung kolaborasi jangka panjang menjadi prasyarat utama agar Model Hexahelix dapat berkontribusi secara optimal dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan pembangunan pertanian yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, I., Weda, W., & Tamitiadini, D. (2019). Pengembangan model literasi dan informasi berbasis Pancasila dalam menangkal hoaks. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(1), 101–111.
- Ahmad, R. S., Sulaiman, Z., Nik Hussain, N. H., & Mohd Noor, N. (2022). Working mothers' breastfeeding experience: a phenomenology qualitative approach. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 85.
- Aliffianti, H. F., & Rachma, S. A. (2023). Peran Ganda Perempuan Petani dan Pengaruhnya terhadap Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kota Serang). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1.
- Arifah, A., Lestari, A., & Ichsan, M. N. (2022). Literasi Media sebagai Filter Hoaks di Media Sosial oleh Pelajar di Jakarta. *Jurnal Masyarakat Siber (JMS)*, 1(1), 11–16.
- Artini, K. A. S., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2025). DINAMIKA ADVOKASI PERUBAHAN IKLIM OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH DI LAMPUNG TIMUR. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(3), 367–380.



- Asnuryati, A. (2023). Strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa: mendorong pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183.
- Azizah, L. N. (2024). Pengembangan Kapasitas Komunitas Nelayan Bagan Dan Lingkungan Sosialnya Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 39–52.
- Efendy, E., Mulyawati, S., & Puspayani, N. L. M. (2025). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA KWT NINE SERU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH). *AGROTEKSOS*, 35(1), 183–190.
- HABIBUROHMAN, H. (2023). PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KELOMPOK WANITA TANI (KWT) SRI REJEKI DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management*, 12.
- Indraningsih, K. S., & Mardiharini, M. (2021). Prospek Keberlanjutan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 69–87.
- Jurnal, C., & Anggoma, F. F. (2022). Collaborative Governance In CSR: Praktik CSR PT Pertamina Patra Niaga FT Maos Dalam Program Mernek Jernek. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 7(1), 1–14.
- Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2013). Access to capital, investment, and the financial crisis. *Journal of Financial Economics*, 110(2), 280–299.
- Kasim, S. S., Supiyah, R., Roslan, S., Anggraini, D., Sos, S., Tawulo, M. A., & Sos, S. (n.d.). GENDER DAN PERTANIAN: DINAMIKA PERAN PEREMPUAN TANI DI SEKTOR INFORMAL PADA ERA PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI.
- Kurniawati, D. (2025). KETERLIBATAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI "MAKMUR LESTARI"(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Leydesdorff, L. (2000). The triple helix: an evolutionary model of innovations. *Research Policy*, 29(2), 243–255.
- Miller, K., McAdam, R., & McAdam, M. (2018). A systematic literature review of university technology transfer from a quadruple helix perspective: toward a research agenda. *R&D Management*, 48(1), 7–24.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Hidayatullah, N., Wahyuningsih, M., Dizar, S., Octaviani, D., Kusumastuti, S. Y., Sumiyarti, S., Suparyati, A., & Indrianto, A. T. L. (2025). *Desa Berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam Pembangunan Desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Pelawi, J. B., Oktarina, S., Arisandi, D., & Pertiwi, R. A. (2025). Respon kelompok wanita tani terhadap peran Balai Penyuluhan Pertanian Sekojo dalam ketahanan pangan wilayah perkotaan Kota Palembang. *Exact Science Research Journal*, 1(1), 24–31.
- Rachim, A., Warella, Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S. (2020). Hexa Helix: Stakeholder model in the management of Floodplain of lake Tempe. *Prizren Social Science Journal*, 4(1), 20–27.
- Sahreza, Y. (2023). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Anggrek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Arse Nauli. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Setiyaningsih, E. W. (2025). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Jurnal Semarak Kabumian*, 3(2), 48–60.
- Suhartini, S., Padmaningrum, R. T., & Ebdarwati, L. (2025). INOVASI PEMBUATAN MINUMAN HERBAL DI KELOMPOK WANITA TANI BAROKAH UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN, PEMASARAN DIGITAL, DAN DAYA SAING PRODUK. *Jurnal Abdi Insani*, 12(11), 6529–6542.
- Sunu, A. H. (2024). ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus: Kelompok Wanita Tani Karang Melati Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 434–449.
- TARAKAN, K. (n.d.). STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) "KARUNGAN LESTARI" KECAMATAN TARAKAN TIMUR.
- Wicaksono, A. (2019). Kolaborasi multi aktor dalam program restorasi gambut di Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 99–113.



Yanuarita, D., & Desnia, A. (2023). Strategi komunikasi pemasaran terpadu melalui media sosial instagram sebagai sarana promosi di sekolah alam kebun tumbuh. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 3(2), 245–256.

